

# MASYARAKAT MADURA DAN RENCANA PEMBANGUNAN PLTN; PERSPEKTIF TEOLOGI

Abd A'la

*(Staf pengajar pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dan Asiten Direktur Bidang Akademik pada lembaga yang sama)*

## **Abstrak :**

*Setiap pemanfaatan energi selalu memiliki resiko environmental. Resiko dalam dunia ilmu dapat ditolelir jika hal itu telah terkalkulasikan sehingga merupakan caculable risk. Sementara untuk energi nuklir, sampai saat ini, belum dapat dilakukan terutama terkait dengan teknologi pengamannya sehingga Fitjof Capra menyebutnya sebagai rasionalitas yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat Madura merupakan komunitas Sunny dan dalam merespon setiap perkembangan selalu berjangkar pada prinsip-prinsip Sunny yang dicirikan dengan kehati-hatian dan moderasi. Terkait dengan rencana PLTN madura, masalah data tentang kebutuhan hal itu harus segera diperoleh untuk menjawab perlu tidaknya PLTN di Madura. Kekhawatiran bahwa kebutuhan itu hanya merupakan rekayasa perusahaan reaktor nuklir patut di pertimbangkan karena memang sangat beralasan*

## **Kata Kunci :**

*masyarakat madura, nuklir, PLTN*

## **Pendahuluan**

Dunia kontemporer dengan modernisasi dan yang dikembangkannya telah mengantarkan Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat global. Dalam konteks itu, Madura dengan masyarakatnya–disadari atau tidak–termasuk salah satu unsur yang berada dalam pusaran dan lingkaran pendesabuanaan yang hingga saat ini terus memicu debat kontroversial. Modernisasi dan segala derivasinya sebagai suatu realitas telanjang yang ada di hadapan masyarakat Madura bagaimanapun juga perlu direspons secara kritis. Mereka

menjadi mutlak melakukan hal ini karena–disadari atau tidak, bahkan disengaja atau tidak–modernisasi, di samping memberikan manfaat yang besar, juga telah melahirkan berbagai persoalan serius bagi kehidupan dan umat manusia. Atas nama modernisasi, sejumlah bangsa, dan sejumlah masyarakat terperangkap dalam kubangan persoalan yang mengancam identitas atau kehidupan mereka. Bahkan pembiaran masalah itu tidak mustahil akan mengancam kehidupan seluruh umat manusia.

Pengembangan tenaga nuklir dalam beragam bentuknya sebagai anak kandung modernisasi senyatanya berada seutuhnya

dalam kerangka itu. Pada sisi itu, masyarakat Indonesia, dan khususnya masyarakat Madura menjadi niscaya untuk melihat dan menyikapinya dengan penuh kearifan, holistisitas, dan kekritisian. Agama—sebagai salah satu variabel penentu dalam kehidupan mereka—menjadi niscaya untuk dijadikan sebagai dasar dalam memahami dan merespons proyek tersebut.

### **Globalisasi dan Pembangunan PLTN**

Salah satu karakteristik dunia kontemporer terletak pada perkembangan aspek-aspek kehidupan yang berjalan begitu cepat. Sains dan teknologi merupakan dua unsur utama yang telah mengubah kehidupan menjadi berbeda dari masa-masa sebelumnya. Melalui kedua unsur ini penciptaan dan pengembangan penemuan-penemuan baru, atau reformulasi dan rekonstruksi yang lama dengan tingkat yang cukup mencengangkan tumbuh dan berkembang pesat dalam kehidupan umat manusia. Rahasia alam dikuak, dan mitos ditumbangkan. Sains dan teknologi telah mengantarkan manusia ke dalam kondisi penguasaan yang nyaris mutlak terhadap alam. Penguasaan subyektif tersebut memberi kesempatan kepada mereka yang “kreatif” dan dominan untuk mengubah dunia dan pandangan tentang dirinya secara radikal. Manusia telah diangkat dari status tamu ke status tuan rumah (dan bahkan arsitek rumah tersebut). Dengan demikian, manusia melihat dirinya lebih sebagai pemilik hak-hak daripada hamba yang memiliki kewajiban.<sup>1</sup>

Manusia sampai derajat tertentu menjadi kehilangan kearifannya. Kemudahan hidup yang dipijakkan sepenuhnya pada rasionalitas membuat

mereka lupa diri, serta bias menyikapi masa depan, manusia yang lain, dan lingkungan alam. Mereka bisu terhadap bencana, atau menjadi dalang dalam tragedi kemanusiaan yang dari saat ke saat masih terus menghiasi kehidupan. Modernitas dalam realitasnya ternyata terlalu tergantung kepada logos. Padahal logos memiliki keterbatasan. Ia tidak mampu mengurangi kesedihan dan kepedihan manusia. Argumen rasional (semata, pen) tidak akan mampu memahami tragedi.<sup>2</sup>

Meskipun kultur modern telah memberdayakan umat manusia, membukakan mereka dunia yang baru, memperluas cakrawala pandangan manusia, serta memungkinkan banyak di antara mereka untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia dan sehat, tapi pada saat yang sama kultur modern sering menjatuhkan harga diri manusia, dan telah membuat mereka memproklamirkan bahwa manusia sebagai tolok ukur segalanya, serta membebaskan mereka dari kebergantungan berlebihan kepada Tuhan. Demikian pula, kultur ini membuka kelemahan moral, kerentanan dan minimnya kehormatan manusia<sup>3</sup>. Kultur modernitas telah menjadikan sebagian manusia kehilangan keutuhan dirinya sebagai makhluk rasional sekaligus spiritual. Beratus-ratus contoh dapat dikuak dengan mudah untuk membenarkan keterbatasan, kelemahan, serta dampak negatif kultur modern. Pemanasan global sebagai efek rumah kaca hingga keangkuhan dan egoisme perusahaan-perusahaan multinasional merupakan bukti telanjang yang menguak dengan telak salah satu kebobrokan kultur yang sering diagung-agungkan oleh

<sup>1</sup> Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 87.

<sup>2</sup> Karen Armstrong, *The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam*, (London: Harper Collin Publisher, 2000), hlm. Xv.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 366

sebagian kita. Demikian pula, modernitas yang dianut Barat telah mengantarkan sebagian negara di Dunia Pertama itu kepada upaya penguasaan—dari bentuknya yang tersamar hingga paling transparan—terhadap negara-negara berkembang. Sebagian dunia pertama yang maju telah menjadikan negara-negara di Dunia Kedua dan Ketiga sebagai obyek sapi perahan mereka.

Pada tataran itu, globalisasi sering (atau mungkin, selalu) menjadi alat kepentingan negara-negara maju semata. Proses yang dianggap berawal dari ekspedisi Vasco da Gama pada tahun 1497 itu sejatinya bukan soal perdagangan bebas semata (sebagaimana menjadi anggapan sebagian orang saat ini, pen), tapi juga soal pandangan hidup yang meremehkan dari mereka yang kuat terhadap mereka yang lemah. Globalisasi bukan soal yang perlu disoroti dari segi keadilan ekonomis belaka. Lebih dari itu, secara historis globalisasi tampaknya perlu dikritik sebagai paradigma dari mereka yang kuat dan berkuasa (Barat) yang telah berabad-abad lamanya tak pernah bisa membebaskan diri dari nafsu untuk menjarah dan menjajah negara-negara miskin.<sup>4</sup> Konkretnya, globalisasi merupakan neo-kolonialisme; suatu penjajahan dalam bentuk yang baru.

Dalam perspektif mikro, globalisasi memetamorfosis menjadi persekongkolan bisnis dan pemerintah—yang menurut George Soros sebagaimana dikutip Priyono—akan menjadi ancaman paling serius terhadap kebebasan dan demokrasi. Prosedur demokrasi memang tetap dipatuhi, tetapi berbagai otoritas negara (terutama rakyat sebagai subyek kehidupan, pen) telah dipangkas dan dibengkokkan

---

<sup>4</sup>Sindhunata, "Dilema Globalisasi" dalam *Jurnal Basis* (No. 01- 02, Tahun ke-52, Januari–Februari 2003), hlm. 4.

oleh kepentingan-kepentingan bisnis privat.<sup>5</sup> Kebebasan masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi mereka menjadi terpasung, dan kepentingan publik menjadi tereduksi. Globalisasi dalam bentuknya yang saat ini berjalan mengancam dengan telak moralitas umat manusia. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan industrialisasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, dan khususnya di Madura tampaknya nyaris berada dalam pola dan kerangka kebijakan seperti itu.

Dalam rencana pembangunan PLTN di Madura yang rencananya akan mengambil lokasi di Sokobanah atau Ketapang Sampang, simbol-simbol dan prosedur demokrasi formal, diangkat dan digunakan. Meskipun demikian, semua itu telah direkayasa sedemikian rupa sehingga hasilnya harus bermuara kepada satu kesimpulan yang tidak boleh dirubah, pembangunan PLTN harus dilaksanakan.<sup>6</sup> Dengan demikian, demokrasi mengalami proses pembiasan dan reduksi sebagai justifikasi kepentingan sempit, entah pemerintah, atau pebisnis, yang bisa tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan moral bangsa. Kepentingan masyarakat yang diganggu-ganggu tak lebih dari sekadar diskursus yang dijadikan tameng perlindungan diri oleh pihak-pihak pemilik proyek dan pendukungnya dari penguatan kepentingan sempit dan sesaat mereka.

Berangkat dari kenyataan tersebut, pembangunan PLTN di Madura nyaris

---

<sup>5</sup>B. Herry Priyono, "Marginalisasi ala Neoliberal", dalam *Jurnal Basis* (No. 05 \endash 06, Tahun ke-53, Mei–Juni 2004), hlm. 18.

<sup>6</sup>Andang Subahianto et. Al. *Madura Bicara PLTN*, Cetakan I, (Jember: UPT Penerbitan Universtas Jember, kerjasama dengan Kementerian Ristek RI dan Puslit Budaya Jawa & Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2004), hlm. 70–71.

merepresentasikan wajah globalisasi dengan karakteristiknya yang neo-liberalis dan neo-kolonialistik. Teknologi yang diusungnya menampakkan keangkuhan logos dengan segala kelemahan dan kekurangannya, serta keserakahan *the haves* yang menginjak-injak kaum tidak berpunya. Pengedepanan logos semata yang tidak diimbangi fakultas-fakultas lain yang dimiliki manusia sering menjatuhkan manusia ke dalam lubang ketamakan, dan egoisme yang dibuatnya sendiri.

Karena itu, terlepas dari pro dan kontra, pembangunan PLTN harus disikapi sebagai proyek yang sarat dengan beragam persoalan yang intrinsik melekat pada proyek itu sendiri. Selain memerlukan dana yang cukup besar, proyek ini membutuhkan penetapan yang akurat mengenai tempat dan cara penyimpanan *high-level waste* yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi tajam. Selain itu pasar yang dikuasai pemasok yang terbatas jumlahnya sangat peka terhadap intervensi politik, hukum, gejolak harga atau administrasi. Beragam persoalan itu dan dengan resiko ancaman kesehatan dan keselamatan membuat beberapa negara Barat telah dan akan menutup reaktor nuklir mereka [Italia menutup kelima reaktor nuklirnya antara tahun 1987–1990. Swedia melalui referendum tahun 1980, menyatakan akan menutup dua belas PLTN yang dimiliki. Belgia pada tahun 1999 menyatakan antara tahun 2005 dan 2015 akan menutup tujuh PLTN yang ada di negara tersebut. Belanda pada tahun 2003 telah menutup dua reaktor nuklirnya, dan Jerman pada tahun 2000 menyatakan akan menutup semua PLTN-nya pada tahun 2001.<sup>7</sup>

PLTN bukan sekadar persoalan yang menyangkut teknis dan sejenisnya, tapi

menyangkut persoalan yang berkaitan dengan paradigma dan dasar-dasar hidup yang dianut manusia. Karena itu, syarakat Madura secara khusus, Pemerintah, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam menyikapi rencana pembanguna PLTN dan meniti kehidupan kontemporer serta mengembangkan modernitas yang dijalaninya mungkin perlu belajar dari sejarah dan kenyataan yang ada di sekitar mereka.

### **Masyarakat Madura dan PLTN; Perspektif Agama**

Sejatinya masyarakat Madura memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk menyikapi secara kritis, holistik dan arif rencana pembangunan PLTN. Realitas menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Madura adalah pemeluk agama Islam yang taat.<sup>8</sup> Selain itu pola keberagamaan mereka \endash terlepas dari organisasi formal keagamaan yang dimasuki–merujuk kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah (Aswaja), terutama ala Nahdlatul Ulama. Pola keberagamaan ini memiliki keunggulan tersendiri yang terletak pada nilai dasar yang menjadi pijakan yang mencakup *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tawazun*. Nilai-nilai ini merepsentasikan tentang adanya hubungan interdependensi antara ajaran agama yang absolut dan pemahaman umatnya yang relatif, antara akal dan nash, antara intelektualitas dan spritualitas. Demikian pula, hal itu mengindikasikan adanya keseimbangan antara kepentingan saat ini dan kepentingan masa depan, serta harmonisasi dalam bidang-bidang yang dan lain yang menjadikan agama bersifat transformatif dan mencerahkan.

Dengan nilai-nilai dasar tersebut, para penganut Sunni–seperti masyarakat

<sup>7</sup> Nengah Sudja, "Apa Indonesia Perlu PLTN?" dalam *Harian Kompas* (Selasa 13 Juli 2004), hlm. 33.

<sup>8</sup> Subahianto et. al., *Madura Bicara PLTN*, hlm. 100.

Madura—akan selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi.<sup>9</sup> Secara teoritis mereka akan mampu mengkontekstualisasikan ajaran dan nilai-nilai agama ke dalam konteks historis dan situasi konkret yang mereka jalani. Namun pada saat yang sama, mereka tidak mudah larut dan cair dalam sejarah. Justru mereka dapat mengkritisnya berdasarkan nilai-nilai dasar anutan mereka. Konkretnya, mereka dapat hidup dalam modernitas, tapi tidak terjebak ke dalam arus modernisasi yang hanya mengagung-agungkan logos semata yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai perennial agama dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Berdasar pada nilai-nilai dasar itu, Islam Aswaja mengembangkan beberapa kaidah dasar yang dapat dijadikan rujukan transformatif dalam menyikapi realitas kehidupan yang dialami umat manusia. Salah satunya adalah prinsip tentang keharusan umat Islam untuk menghilangkan setiap bentuk kemudlaratan (bahaya) [Salah satu qawaid fiqhiyah ini berbunyi: *adh-dhararu yuzalu*.<sup>10</sup> Dasar keagamaan Sunni ini berkelindan kokoh dengan prinsip Sunni lain yang mengharuskan setiap kebijakan publik selalu bersesuaian dengan kemaslahatan umat; kepentingan umum masyarakat dan bangsa.<sup>11</sup> Dalam prespektif Sunni, kemaslahatan pada satu pihak, dan eliminasi bahaya atau mafsadah di pihak lain merupakan dua sisi dari mata uang

yang sama. Pada tataran itu, agama senyatanya dihadirkan dalam kehidupan.

Untuk mengembangkan kemaslahatan pada satu pihak, dan menghilangkan mafsadah di pihak lain, serta dalam rangka pembumian kesejahteraan serta kondisi yang kondusif bagi kehidupan, Islam, khususnya kelompok Aswaja—terutama NU—sangat menekankan tiga ajaran, yaitu *al-sidqu, al-amamah wa al-wafa-u bil al-ahd, dan al-ta`wun*.<sup>12</sup> Ketiga ajaran ini menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab serta solidaritas sosial bagi umat Islam, dan umat manusia secara khusus, dalam kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan di ranah publik. Dengan ketiga ajaran ini, suatu yang dianggap maslahat atau mafsadah perlu dibuktikan secara transparan serta dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada Allah. Kebaikan sejati yang dipastikan sejalan dengan kepentingan umum perlu didukung melalui kerjasama dan pengembangan solidaritas di antara mereka; dan demikian sebaliknya. Pada gilirannya, semua prinsip keagamaan Sunni tersebut tidak dapat dilepaskan dari pandangan dasar lain yang selalu menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan. Pandangan tersebut adalah keharusan umat Islam untuk menjaga tradisi (keilmuan, budaya dan lainnya) yang lama yang bernilai baik, serta pada saat yang sama mampu mengambil aspek-aspek kehidupan yang lebih baik [Dalam keilmuan islam klasik konsep tersebut berbunyi: *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*]. Dalam hal ini, tolok ukur mengenai hal-hal yang baik

<sup>9</sup> Said Aqiel Siraj, "Ahlussunah wa Jamaah di Awal Abad XXI", dalam Imam Baehaqi, ed., *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, Cetakan I (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 140.

<sup>10</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'i*, Cetakan I, (Jakarta: Syirkah Nur al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1965), hlm. 59.

<sup>11</sup> Dalam *qawaid fiqhiyah* disebutkan: *tasharruf al-Iman 'ala al-ra'iyah manuth di al-mashlahah*. Lihat Ibid., hlm. 83.

<sup>12</sup> Endang Turmudi, ed., *Nahdliu Ulama: Ideology Politics and the Formation of Khaira Ummah*, Cetakan I, (Jakarta: PP LP. Ma'arif NU, 2003), hlm. 77.

dan lebih baik didasarkan sepenuhnya pada aspek moral.

Pandangan dasar tersebut bernilai signifikan bagi masyarakat Madura secara khusus, umat Islam dan umat manusia secara umum dalam menyikapi dan mengembangkan kehidupan yang sedang atau akan mereka jalani di masa kontemporer. Berdasar pada prinsip sebagaimana dicandera tersebut serta prinsip-prinsip Sunni lain, mereka dapat menyikapi modernitas secara utuh yang didasarkan bukan kepada logos semata, tapi juga kepada kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Moralitas dan intelektualitas menjadi pijakan mereka dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan persoalan kehidupan, apalagi yang memiliki kaitan dengan persoalan publik. Dengan demikian, mereka dapat memaknai modernitas dan seluruh proses kehidupan serta mampu mengkritisi tujuan akhir yang akan dicapai sehingga hal itu akan selalu bermakna bagi mereka, serta dapat menyebarkan kemaslahatan bagi seluruh isi alam. Selain berpijak pada nilai autentik ajaran agama, prinsip-prinsip keagamaan Sunni tersebut juga berjalan seiring dengan nilai-nilai demokrasi substansial yang intinya bersifat moral. Sebagaimana dinyatakan Lincoln yang dikutip oleh Elshain, inti demokrasi adalah *of the people, by the people, dan for the people*.<sup>13</sup>

Dalam ungkapan lain, aspirasi dan kepentingan umum merup akan tolok ukur berjalan tidaknya demokrasi dalam suatu masyarakat. Masyarakat Madura sebagai masyarakat yang religius dan sebagai bagian bangsa Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan demokrasi menjadi niscaya untuk melabuhkan nilai-nilai perennial tersebut ke

dalam kehidupan mereka.. Melalui pembumian nilai itu, mereka dihadapkan kepada suatu kemestian untuk bersikap kritis terhadap segala kebijakan atau persoalan yang berada di ruang publik serta mempertanyakannya dengan penuh kearifan sejauh mana kebijakan tersebut telah menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus membawa kepentingan mereka. Selain itu, mereka dengan bekal kekayaan kecerdasan dalam berbagai dimensinya \endash intelegensi (logos), spiritual, dan emosional-dituntut untuk memahami perkembangan kehidupan, termasuk pembangunan PLTN, seutuh mungkin sehingga seluk beluk dan dampaknya itu dapat dikuak sedini mungkin. Melihat kenyataan yang ada, rencana pembangunan PLTN di Madura tampaknya berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi substansial, apalagi dengan nilai ajaran Sunni. Hal itu tampak dari minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan proyek tersebut, kurangnya transparansi, dan sebagainya. Seiring dengan hal itu, kemaslahatan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan masih mengundang debat yang sangat panjang. Bahkan jika kita harus jujur, dampak negatif yang akan ditimbulkan kemungkinan besar berada jauh di atas manfaat yang bisa diraih. Dengan demikian, pengabaian kepentingan umat bukan saja menafikan demokrasi, tapi juga telah memotong misi luhur agama.

### **Penutup: Perumusan Sikap**

Kehidupan jelas bukan medan perjudian. Masyarakat Madura dan pemerintah Indonesia tidak bisa berspekulasi dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan mereka. Mereka hidup bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup bersama dengan manusia yang lain dan pada gilirannya

<sup>13</sup>Jean Bethke Elshain, *Democracy on Trial* (New York: BasicBooks, 1995), hlm. 96.

memiliki tanggung jawab untuk mewariskannya kepada generasi sesudah mereka. Sejauh ini, rencana Pembangunan PLTN terkesan sangat spekulatif. Ia mengandaikan tidak adanya alternatif lain yang bisa dijadikan tolehan ke depan. Padahal, kita semua tahu negeri ini banyak memiliki cadangan sumber daya alam lain yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik dengan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi.<sup>14</sup> Selain itu, Pemerintah belum menyiapkan suatu undang-undang tentang tenaga nuklir yang benar-benar berpihak dan menguntungkan masyarakat. Undang-undang ketenaganukliran yang ada cenderung merugikan masyarakat [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUKN) terutama Pasal 28 dan 29 menjelaskan kenyataan itu.<sup>15</sup> Semua itu menunjukkan bahwa Pemerintah dalam pengembangan tenaga nuklir atau dan modernisasi masih berpegang pada logos semata, dan mengabaikan aspek spiritualitas dan nilai-nilai luhur yang lain. Dalam realitasnya, keangkuhan logos sering mengundang bencana kemanusiaan, alam dan sebagainya.

Atas dasar itu, masyarakat Madura dan bangsa Indonesia secara keseluruhan perlu merumuskan secara tegas sikap mereka dalam menghadapi persoalan publik dan kebijakan Pemerintah yang menyangkut kepentingan mereka. Ruang publik adalah milik mereka seutuhnya. Pemerintah sekadar abdi, pelaksana kehendak rakyat dan masyarakat yang berkewajiban mengaktualisasikannya, dan bukan sebaliknya. Dalam kerangka pemahaman semacam itu, pembangunan PLTN sebagai persoalan publik perlu dipahami dan disikapi.

Dalam rangka itu, masyarakat Madura telah memiliki pijakan teologis yang cukup kokoh yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi substantif. Berpijak pada nilai-nilai itu, mereka perlu membangun suatu paradigma alternatif yang mampu melihat, menyikapi dan menghadapi PLTN dan proses globalisasi secara holistik dan kritis *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb*□



---

<sup>14</sup>Fredrik J Pinakunary, "Ambivalensi Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Ketenaganukliran". dalam *Harian Kompas* (13 Juli 2004).

<sup>15</sup> Lihat 8741225 *loc. cit.*

